

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Batara, A. S., & Muzakkir, A. K. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- H, L. O. S. I. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Harun, R., & Press, K. (2019). *Hukum sengketa pemilu: mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., Sukmajati, M., & Umum, I. K. P. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Pranadita, N. (2018). *Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi Hukum dengan Manajemen Strategis dalam Industri Pertahanan Indonesia*.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. H. M. S. (2021). *Epistimologi Seluk-Beluk Kampanye Pemilu: Seri Filsafat Pemilu*. Nusamedia.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.

Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen (ed.3) Koran. (n.d.). Penerbit Salemba.

Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian* (pp. 211–213).

Sulistyaningsih, T., & R, W. H. (2022). *Monograf Model Collaborative Urban Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri.

Jurnal

Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformatif*, 2(1), 29–42.

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13.

Donahue, J., & zeckhauser, R. (2016). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

Dr.Drs.Choirul Saleh, M. S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.

Ellanda, B. (2018). Hubungan kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.

Fahmi, K (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.

Febriansyah, M., (2020). KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in PEMILU 2019. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 275–293.

Habibah, R. (2020). Collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat rt/rw(Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan

- Kota Magelang). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 1–14.
- Hawana, A., Kantor, P., & Hasnah, H. (2022). Peran lembaga KPU dan Bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) saat pemilihan umum. 18, 102–110.
- Hermawan, W. G. (2021). Pengawasan badan pengawas pemilu provinsi Jawa Barat dalam masa kampanye pemilu serentak 2019 di provinsi Jawa Barat. *Fisip Unpas*.
- Kasmoen, M., & Hasan, A. (2024). Inovasi Penyelenggara Pemilu Serentak Nasional 2024 yang Kredibel dan Berintegritas. I.
- Mailanti, N. (2017). Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam menegakkan peraturan KPU. *Uin Raden Intan Lampung*.
- Nartin, N., & Meliyanti, M. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 554–558.
- Setiawan, A., Ulfah, I. F., & Bachtiar, R. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 15–28.
- Sili Teka, S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua). *The Urgency of Collaborative Governance Design in Elections and Pilkada (Case Study of Adhyasta Pemilu)*, 4(1), 1–27.
- Widodo, H., & Eko, D. (2011). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 17–38.